

Jangan Ada Jarak antara Polisi Dan Masyarakat

Oleh : Rully Afifandi

HARI Bhayangkara yang jatuh pada setiap 1 Juli selalu diperingati oleh Kepolisian sebagai hari jadinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di usianya yang ke 60 tahun ini, perayaan Ulah Polri mengambil tema "*Polri Mitra Masyarakat*". Tema ini mempunyai arti luas di tengah perbaikan citra Kepolisian yang selalu menjadi sorotan publik.

Untuk itu Polri terus berupaya mereformasi diri dalam mewujudkan perannya seperti yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan transparansi. Jadi, jangan lagi ada jarak antara Kepolisian dan masyarakat. Harus selalu bersatu membangun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tak heran, selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto, Polri terus berbenah dan mereformasi dirinya, baik struktural, organisasional, dan kultur yang selama ini ada di Kepolisian. Selama perjalanannya, Polri pun telah memantapkan langkahnya di dalam mereformasi instansinya menjadi lebih bermoral, profesional dan modern, pendekatan kepada masyarakat yang dulu kurang, kini pendekatan Polisi kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Kamtibmas diarahkan kepada tataran penyelesaian akar permasalahan.

Namun upaya reformasi tersebut tentunya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Polri. Berbagai masukan, dorongan, dan sumbangan pikiran dari masyarakat itu yang diperlukan, terma-

suk dari berbagai kalangan. Dengan ini diharapkan bisa dijadikan cermin oleh Polri untuk merefleksikan diri terhadap kinerja Polri dapat terus mengabdikan diri melangkah menyongsong hari depan yang lebih baik.

Satu catatan penting yang harus menjadi perhatian Kepolisian adalah mempersiapkan personel yang bermartabat dan bersih, karena sebaik apapun sistem yang sudah ada, tanpa didukung oleh personel yang mempunyai ke-



mampuan, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Dari beberapa kasus masih banyak ditemukan personel Polri terlibat berbagai tindak kejahatan dan korupsi hingga aksi brutalisme. Dari catatan Komite untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras), brutalisme yang dilakukan personel Polri periode Juli 2005 sampai Juli 2006 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 140 kasus aksi brutalisme oleh Polisi dan 53 kasus lainnya berupa kasus yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum yang tidak diproses secara maksimal, dimana yang paling banyak adalah kasus kebebasan berkeyakinan.

Polri mengakui, semua hal ini

masih menjadi tugas yang harus diselesaikannya. Berbagai upaya telah dilakukan pimpinan Polri dalam melaksanakan reformasi kultur, namun hal itu tidak bisa langsung berubah.

Reformasi kultur pun dirasakan masih menjadi tugas berat bagi anggota Polri dalam mencapai Polisi yang profesional dan dekat dengan masyarakat, karena masih ada perilaku anggota Polri yang menyimpang. Namun, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya adalah menghapus perilaku militer di tubuh Polri yang telah lama terbentuk sebagai akibat bergabungnya Polisi dengan TNI dalam kurun waktu yang lama.

Selain itu, Polri juga sudah mengubah kulturnya menjadi Polisi agar dekat dengan masyarakat, diantaranya dengan menggalakkan konsep pemolisian masyarakat. Untuk tindakan anarkisme sendiri, sikap Kepolisian sudah semakin tegas bahwa Polri tidak akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang berbuat anarkis dengan dalih apapun.

Meski hasilnya belum optimal, Kapolri optimistis dengan dukungan moral masyarakat yang menguat, maka tindakan anarkisme dapat dapat diberantas dalam satu tahun ke depan. Sekalipun begitu, banyak yang sudah dilakukan Polri. Tidak bisa dimungkiri masih saja terjadi riak-riak kecil sebagai akibat sisa-sisa perselisihan masa lalu. Untuk itu, Polri mengajak ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahi semua bentuk pelanggaran dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang benar-benar kondusif.***